

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pembangunan pendidikan, karena pendidikan yang bermutu akan turut menentukan mutu pembangunan, sehingga melalui pendidikan akan membentuk dan melahirkan manusia bermutu yang selanjutnya manusia bermutu akan menghasilkan pembangunan yang bermutu pula (Zainail, 2014:143). Pentingnya pendidikan ini perlu dimiliki dan dijadikan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tiap individu senantiasa selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dirinya melalui pendidikan yang dikelola secara profesional agar tujuan melahirkan manusia yang bermutu akan berhasil dengan baik.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Siahaan, 2001:214). Data statistik dan berbagai studi kualitatif mengenai pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat memperlihatkan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi bukan hanya dengan melakukan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Sumanto (2008: 134) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya

pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan bisa dijadikan investasi untuk mendapatkan modal bagi pembangunan tersebut.

Kualitas sumber daya manusia dapat diketahui melalui laporan *United Development Program* (UNDP) tentang *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati urutan ke 113 dari 188 negara.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Asia Tenggara Tahun 2015

Negara	Ranking IPM	IPM	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	GNI Per Kapital (\$)
Singapura	5	0,925	83,2	15,4	11,6	78,162
Brunei Darussalam	30	0,865	79,0	14,9	9,0	72,843
Malaysia	59	0,789	74,9	13,1	10,1	24,620
Thailand	87	0,740	74,6	13,6	7,9	14,519
Indonesia	113	0,689	69,1	12,9	7,9	10,053
Filipina	116	0,682	68,3	11,7	9,3	8,395

Sumber: Laporan UNDP Tentang HDI Tahun 2015

Tabel di atas menggambarkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2015. Dapat dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Rendahnya IPM di Indonesia disebabkan karena pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan perbaikan kualitas sumber daya manusianya (Saichudin, 2015). Padahal IPM menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara tingkat kemajuan ekonomi yang diukur dengan pendapatan per kapita dengan kualitas manusianya. Semakin baik kualitas manusianya, maka semakin besar pula pendapatan per kapitanya (Zainal, 2014:13).

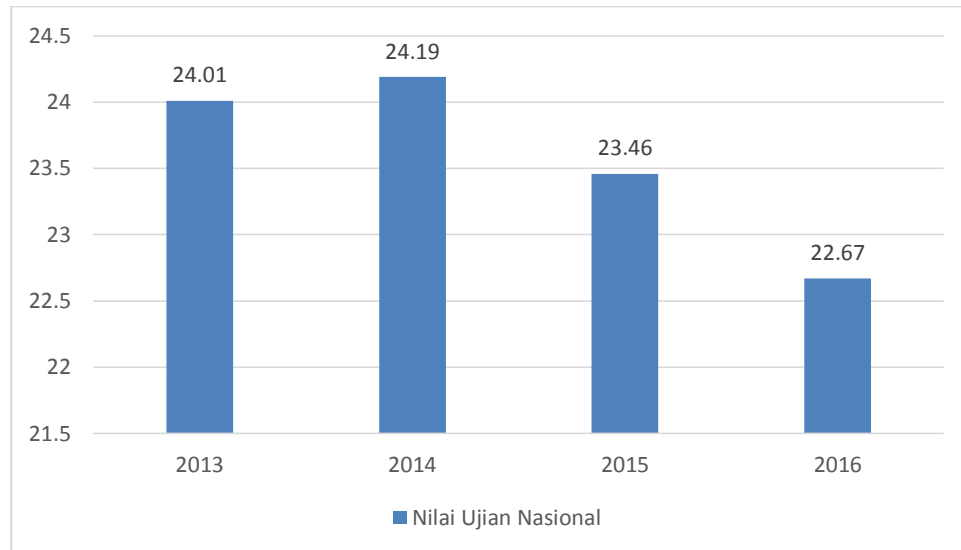
Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu usaha yang tepat adalah dengan menyediakan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya (Saichudin, 2015). Kemudahan mengakses pendidikan dan didukung oleh sarana prasarana pendidikan yang lengkap serta tenaga pendidik yang berkualitas. Dengan kesempatan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi tentu akan menjadi modal penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil.

Pada tahun 2015 Indonesia menempati urutan ke-69 dari 76 negara dalam *The Best Education System In The World*, di mana Singapura menempati urutan pertama. Tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke-57 dari 65 negara pada *World Education Ranking*. Survey yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) ini bertujuan untuk mencari tahu negara mana yang terbaik dalam pendidikan jika dilihat dari segi membaca, matematika dan ilmu pengetahuan.

Peringkat yang diraih Indonesia pada survey-survey di atas menunjukkan jika mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.

Di dalam negeri sendiri, keberhasilan pendidikan dapat diketahui melalui penyelenggaraan ujian nasional. Menurut Setiadi (2013) ujian nasional merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Ujian nasional menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4 adalah penentu kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan. Ujian nasional bertujuan untuk mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan diselenggarakannya ujian nasional, kita dapat mengetahui seberapa besar pencapaian yang diperoleh siswa selama proses belajar di sekolah.

Mutu pendidikan di Kota Bandung berdasarkan hasil ujian nasional memang tidak mengecewakan bahkan cenderung membanggakan karena nilainya termasuk tinggi. Namun, nilai ujian nasional di Kota Bandung tercatat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Jika pada tahun 2014 nilai ujian nasional SMP mengalami kenaikan sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 nilai ujian nasional SMP mengalami penurunan yakni dari 24,19 ke 23,46 dan turun lagi di tahun berikutnya menjadi 22,67.



Grafik 1.1
Nilai Ujian Nasional SMP Tahun 2013 – 2016 di Kota Bandung
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (diolah)

Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Salah satunya karena mahalnya biaya pendidikan (Aristin, 2015). Sebagai sebuah negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan baik. Dibanding dengan negara-negara yang tergabung dalam G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 masuk peringkat tiga besar setelah India dan Tiongkok. Siregar (2007) mengatakan jika pertumbuhan ekonomi berdampak pada kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan atau PDB per kapita cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia (Lambantoruan, 2014). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, ketika pendapatan naik, maka alokasi

belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi serta pendidikan akan meningkat, terutama pada rumah tangga miskin.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013 – 2016

Tahun	PDB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	PDB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	Rp. 9.084,0	Rp. 36,5	5,78
2014	Rp. 10.542,7	Rp. 41,8	5,02
2015	Rp. 11.540,8	Rp. 45,2	4,79
2016	Rp. 12.406,8	Rp. 47,9	5,02

Sumber: BPS Indonesia

Kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Jika dilihat perbandingan APS di antara kelompok umur, memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Terlihat bahwa APS cenderung semakin mengecil pada kelompok umur yang tinggi. Kecenderungan ini menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Karena semakin kecil APS pada kelompok umur tinggi, maka penduduk yang berhasil menempuh pendidikan tinggi masih relatif kecil (Saichudin, 2015).

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia Tahun 2013 – 2016

Tahun	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
2013	98,34	90,62	63,64	20,04
2014	98,83	94,32	70,13	22,74
2015	98,59	94,59	70,32	22,79
2016	98,98	94,79	70,68	23,80

Sumber: BPS Indonesia

Menurut Aristin (2015) mahal nya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena dengan melalui pendidikan seseorang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas hidupnya (Anwar, 2006).

Faktor guru juga mempengaruhi mutu pendidikan. Survey Bank Dunia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia menempati urutan terendah dari 12 negara di Asia . Maka dari itu, pemerintah mengadakan sertifikasi guru secara bertahap sejak tahun 2007. Menurut Siswanto (2008) Sertifikasi guru adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru yang berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Selain itu, jumlah guru juga tidak dapat dikesampingkan. Jumlah guru yang memadai tercermin dalam rasio guru terhadap murid. Rasio guru per murid didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan tujuan untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah (Latumaerissa, 2014). Semakin tinggi rasio guru terhadap murid, maka semakin sedikit jumlah murid yang ditangani setiap gurunya. Jika jumlah murid yang ditangani oleh seorang guru terlalu banyak, akan

mengurangi keefektivan kegiatan belajar yang nantinya akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan.

Selain faktor biaya dan guru, sarana prasarana juga mempengaruhi mutu pendidikan. Menurut Suranto (2015) sarana prasarana belajar yang lengkap yang dimiliki oleh sekolah akan mendukung adanya variasi dalam pelajaran. Sekolah hendaknya memerhatikan kriteria minimal pada sarana prasarana yang telah diatur dalam standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekspresi dan berkreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Peran Sarana Prasarana terhadap mutu pendidikan tercermin dalam rasio murid terhadap kelas. Rasio murid per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah, di mana semakin tinggi angka rasio, berarti tingkat kepadatan kelas semakin tinggi (Latumaerissa, 2014). Banyaknya murid di suatu akan mengurangi keefektivitasan kegiatan belajar. Dengan kata lain semakin tinggi rasio murid per kelasnya, maka semakin rendah mutu pendidikannya.

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada mutu pendidikan dengan nilai ujian nasional. Adapun untuk mengetahui pengaruh sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan adalah dengan menggunakan rasio guru tersertifikasi terhadap jumlah keseluruhan guru. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap mutu pendidikan adalah dengan menggunakan rasio murid terhadap kelas yang telah disesuaikan dengan beberapa teori menurut para ahli. Penelitian ini difokuskan pada kecamatan di Kota Bandung yang memiliki SMP Negeri yang keseluruhannya berjumlah 26 kecamatan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Sertifikasi Guru, Rasio Guru Murid dan Sarana Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada SMP Negeri di Kota Bandung Periode 2013 – 2016)”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio guru murid dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan secara masing-masing?
2. Sejauh mana pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio guru murid dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio guru murid dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan secara masing-masing.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio guru murid dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio murid guru dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Bagi pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian dan identifikasi kekuarangan dalam proses pelaksanaan pendidikan sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti kembali mengenai pengaruh pendapatan masyarakat, sertifikasi guru, rasio murid guru dan sarana prasarana terhadap mutu pendidikan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan dan masukkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap laporan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik yang terdapat di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Penulis memperoleh data dengan melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 239, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Dr, Rajiman No. 6 dan Kantor Badan Pusat Statistika Kota Bandung yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 93. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai dengan selesai.